

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR

R. Putra Samad dan Rita Yani Iyan

*Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Binawidya Jln. HR Subrantas Km 12.5 Pekanbaru 28293*

Abstraksi

Berhasil atau tidaknya percepatan pembangunan sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dan dinamika masyarakat, akan sangat tergantung kepada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang ada, (2) mengkaji kebijakan-kebijakan dalam optimalisasi potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan, dan (3) mendapatkan gambaran jelas tentang kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Hasil studi menunjukkan bahwa, Kabupaten Rokan Hilir berpeluang meningkatkan potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan sekitar 20 hingga 50 persen, khususnya pajak penerangan jalan, pemanfaatan air bawah tanah, retribusi kesehatan, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil minyak dan bagi hasil pajak. Dalam pengelolaan penerimaan, belum memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin bahwa prosedur dan kebijakan manajemen yang dibuat telah ditaati serta minimnya petugas di lapangan.

Kata kunci : *potensi PAD, dana perimbangan*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya memerlukan dana yang cukup besar, baik berupa pembiayaan rutin maupun biaya pembangunan. Untuk itu perlu digali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan telah disahkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terlihat bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi.

Di dalam pelaksanaannya, tolok ukur keberhasilan otonomi daerah diukur berdasarkan kinerja ekonomi meliputi tiga aspek penting, yakni institusional, keuangan dan aparatur pemerintah. Dari ketiga aspek tersebut, kemampuan keuangan menjadi persoalan yang krusial dalam menentukan berkembang atau tidaknya otonomi daerah.

Bagaimana keleluasaan daerah dalam mengoptimalkan otoritas administratifnya dapat dilihat dari berapa banyak potensi sumber-sumber keuangan yang bisa digali atau dikembangkan dan didistribusikan pada berbagai kegiatan pembangunan daerah. Jika daerah tidak mampu secara leluasa mengoptimalkan otoritas administratif yang dimilikinya, maka semakin besar pula kendala pembiayaan pembangunan. Kendala ini akan berimplikasi pada semakin terbatasnya “Sumber Pendapatan Asli Daerah” yang pada gilirannya membuat daerah akan semakin tergantung pada pemerintah pusat.

Setakat ini, sebagai salah satu kabupaten yang bersiap diri melaksanakan otonominya, kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa kendala internal, salah satunya adalah rendahnya kontribusi PAD dan Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diajukan identifikasi masalahnya : Seberapa besar potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan di Kabupaten Rokan Hilir.

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kerangka Pemikiran dan Tinjauan Pustaka

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan. Dalam hal ini laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Nugroho. D. 2000)

Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis bahwa, tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting, selain karena keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, menentukan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik (Widjaja. 1998)

Sistem dan mekanisme pemungutan pendapatan asli daerah sendiri hingga dewasa ini belum optimal, maka paling tidak porsi pendapatan asli daerah sendiri didalam sumber pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan secara signifikan (Basri. 1995)

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah perlu memperkirakan/menghitung potensi, kemudian membandingkan antara potensi dengan realisasi yang telah dicapai . Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar maka segera diteliti kelemahan yang ada , mungkin terletak pada pendaftaran wajib pajak/retribusi , penetapan tarif, cara pungutan dan cara pemonitauran /pengawasan (Hamrolie. 1990)

B. Hipotesis

Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap APBD tahun 2003 kabupaten Rokan Hilir berpotensi meningkat secara signifikan.

III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini antara lain: Jenis, besar dan objek pajak daerah (riil dan potensial), jenis, besar dan objek retribusi daerah (riil dan potensial), keseluruhan perusahaan milik daerah.

Sumber-sumber daya alam dan manusia (potensial dan aktual) yang meliputi: sumber daya perikanan, sumber daya kehutanan, sumber daya perkebunan, sumber daya pertambangan (khusus Galian Golongan C), dan sumber daya kepariwisataan.

B. Populasi

Penentuan populasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, terdiri dari: Aparatur Pemerintah Daerah (Bupati, Sekda, Inspektorat Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda), Pimpinan perusahaan daerah, Pengusaha, LSM dan masyarakat.

C. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: Kajian literatur, Wawancara dan pengisian daftar kuisioner, observasi lapangan, dan investigasi.

D. Metode Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul ditabulasi dan disusun dalam bentuk tabel untuk kemudian di analisis. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Metoda kualitatif terutama digunakan dalam menganalisis kinerja kelembagaan birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam menghitung dan memproyeksikan potensi penerimaan dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Penerimaan PAD

1. Potensi Teoritis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan data ditemukan bahwa potensi teoritis penerimaan pajak restoran adalah Rp 672.000.000/bulan dan potensi penerimaan pajak hotel diperkirakan adalah Rp 108.000.000,-. Dengan menggabung kedua potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran diperoleh angka sekitar Rp 780.000.000,- per bulan.

❖ **Kendala Operasional**

- Secara umum pemilik usaha tidak mau membayar pajak sesuai dengan kewajiban, melainkan melalui hasil negosiasi.
- Kurangnya sosialisasi bagi wajib pajak bahwa kalau dikenakan pajak maka keuntungan yang didapat akan berkurang.
- Masih kurangnya petugas pemungut pajak di lapangan.

Ketiga faktor tersebut diatas menggambarkan banyaknya kendala yang besarnya diperkirakan 0.50. Ini berarti bahwa peluang tercapainya potensi teoritis pajak hotel dan restoran hanya 50 %.

❖ *Potensi Penerimaan Realistis*

Bila potensi penerimaan pajak hotel dan restoran Rp 780.000.000,- dan faktor koreksi 0.50 maka nilai potensi realistis adalah Rp 340.000.000,-.

❖ *Strategi Peningkatan realisasi Penerimaan*

Mengintensifkan program penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak secara langsung atau tidak langsung. Berupaya menegakkan aturan secara konsisten dan konsekuen. Terus melakukan pendataan untuk menambah wajib pajak baru. Memberikan tambahan insentif terhadap petugas lapangan. Mempercepat pembuatan Perda tersendiri (lepas dari Kabupaten Induk).

2. Potensi Teoritis Penerimaan Pajak Hiburan

Seiring dengan perkembangan beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi maka potensi teoritis penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 2.500.000 tidak terlalu sulit untuk dicapai.

❖ Kendala Operasional dan Potensi Realistis

Kalau diperhatikan kendala pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Rokan Hilir relatif tidak begitu besar, namun persoalannya justru terletak pada objek pungutan yang sangat terbatas. Dengan demikian faktor kendala diperkirakan 0,10 atau dengan kata lain potensi realistis 0,90. Dengan demikian potensi realistis penerimaan pajak hiburan adalah: $0,90 \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 2.250.000,-$

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

Strategi peningkatan realisasi penerimaan pajak hiburan antara lain dilakukan : Mendata dan mengawasi setiap kegiatan permanen maupun insidental yang masuk kedalam struktur pajak hiburan. Mendata perkembangan usaha yang termasuk dalam kelompok pajak hiburan khususnya bagi daerah yang pesat perkembangan ekonominya

3. Potensi Penerimaan Pajak Reklame

Untuk menghitung potensi teoritis penerimaan pajak reklame Rokan Hilir dimasa yang akan datang digunakan asumsi sebagai berikut:

- Jumlah objek pajak tahun 2003 adalah 125 % dari jumlah tahun 2002 yaitu $125\% \times 2.368$ yaitu sebanyak 2960 objek pajak.
- Nilai sewa reklame yang sekarang rata-rata Rp 24.000 dinilai sangat rendah dan dapat dinaikkan 50 % atau menjadi Rp 36.000.

Berdasarkan asumsi tersebut diatas maka potensi penerimaan pajak reklame adalah sebesar : $2960 \times \text{Rp } 36.000 = \text{Rp } 106.560.000,-$

❖ Kendala Operasional dan Potensi Realistis Penerimaan

Bila data dilapangan digunakan sebagai acuan untuk menentukan potensi realistis penerimaan pajak reklame maka diperkirakan faktor koreksi sebesar 0,30. Dengan demikian potensi realistis penerimaan pajak reklame tahun 2003 adalah 0,70 atau senilai: $0,70 \times \text{Rp } 106.560.000 = \text{Rp } 74.592.000,-$

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

Beberapa strategi dalam meningkatkan realisasi pajak reklame, yakni :

- Peningkatan pemahaman dan kesadaran pemilik reklame dalam bentuk sosialisasi, bahwa apapun bentuknya maupun ukurannya, reklame harus dikenai pajak.

- Merubah atau merevisi Perda terutama mengenai nilai sewa dan menaikkan tarif dasar reklame.
- Meningkatkan tarif dasar pajak reklame untuk yang berukuran diatas 2 meter secara progresif.
- Meningkatkan pengawasan rutin secara berkala untuk mengawasi adanya penambahan reklame baru.

4. Potensi Teoritis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan data BPS Propinsi Riau tahun 2000, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 45.530 rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Jika diasumsikan bahwa setiap Rumah tangga membayar penggunaan tenaga listrik rata-rata Rp. 25.000 per bulan dan dikenakan PPJ 4%, maka diperkirakan penerimaan PPJ dari listrik PLN sektor rumah tangga adalah : Jumlah Rumah Tangga x Pembayaran rata-rata /bulan x 12 bulan x 4% = $45.330 \times \text{Rp. } 25.000 \times 12 \times 0,04 = \text{Rp. } 543.960.000$ per tahun.

Dengan asumsi nilai jual listrik 1 KVA = Rp. 45.000./bulan, dan rata-rata tarif pajak 5%, maka didapat potensi teoritis Nilai jual Captive Power di Rokan Hilir dapat dihitung sebagai berikut: Nilai Captive Power X Nilai jual/KVA X 12 X 0,05 = $13.525 \times \text{Rp } 45.000 \times 12 \times 0,05$ atau sekitar Rp. 365.121.000,-. Dari kedua perkiraan diatas, maka potensi penerimaan PPJ adalah Rp 909.081.000,-.

❖ *Kendala Operasional dan potensi Realistis*

Dinilai cukup banyak pemilik dan pengguna listrik non PLN yang belum dapat terdata secara benar beberapa penggunaan tenaga listriknya.

Berdasarkan kendala operasional di atas maka diperkirakan faktor koreksi masih cukup tinggi yakni sekitar 0,20. Dengan demikian potensi realistis pendapatan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar: $0,80 \times \text{Rp.}909.081.000 = \text{Rp } 727.264.800,-$

❖ *Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan*

- Melakukan pendataan kembali pemakaian listrik non PLN secara akurat.
- Melakukan intensifikasi penagihan agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

❖ Kendala Operasional dan Potensi Realistis Penerimaan

- Belum terdata dan sulitnya jangkauan untuk mencapai daerah operasional tambang bahan galian golongan C.
- Masih minimnya aparat yang dapat dan mampu melakukan tugas dan pengawasan terhadap tambang bahan galian C.
- Mengingat kendala yang dihadapi cukup tinggi, maka faktor koreksi diperkirakan mencapai 0,50. Artinya, potensi realistis penerimaan pajak bahan galian C hanya 0,50 atau senilai $0,50 \times \text{Rp}114.304.640 = \text{Rp} 57.152.320,-$

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

- Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap tambang bahan galian C.
- Meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap bahan tambang galian C.

5. Potensi Penerimaan dari Retribusi Daerah

❖ Potensi teoritis penerimaan pelayanan Kesehatan

Untuk menghitung potensi teoritis penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: Sampai akhir tahun 2001 jumlah rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 7 unit yang terdiri dari Kecamatan Bangko 1 unit Puskesmas, Rimba Melintang 2 unit Puskesmas, Tanah Putih 1 unit Puskesmas, Kubu 2 unit Puskesmas dan Bagan Sinembah 1 unit Puskesmas. Untuk Puskesmas pembantu yang berada diseluruh Kecamatan berjumlah 53 unit.

Jumlah kunjungan ke Rumah sakit dan Puskesmas tersebut tahun 2001 adalah berdasarkan data struktur 10 besar penyakit yang diderita penduduk. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2001 jumlah kunjungan baru rawat jalan dan rawat inap adalah sebanyak 132.013 orang.

Ditetapkan retribusi per pasien Rp. 1.000,-

Berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan di atas maka diperkirakan potensi penerimaan teoritis dari retribusi pelayanan kesehatan kabupaten Rokan Hilir adalah $\text{Jumlah Kunjungan} \times \text{Rp. 1.000} = 132.013 \times \text{Rp. 1.000} = \text{Rp. 132.013.000/tahun}.$

Kendala operasional dalam memungut retribusi pelayanan kesehatan relatif kecil untuk itu diperkirakan faktor kendala 0,10, artinya faktor koreksi 0,90. Dengan demikian potensi realistis penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar $0.90 \times \text{Rp } 132.013.000 = \text{Rp } 118.811.700,-$.

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

- Memaksimalkan penggunaan karcis retribusi.
- Meningkatkan mutu pelayanan pada pasien yang berkunjung dan rawat inap.
- Potensi Teoritis Penerimaan Pelayanan Persampahan, Retribusi dan pasar.
- Potensi penerimaan dari Dinas Pasar dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi berikut:
 - Bertambahnya pasar di bawah pengelolaan Dinas Pasar minimal 1 (satu) pasar setiap tahunnya.
 - Bertambahnya jumlah toko/kios yang berada di lokasi dan sekitar pasar rata-rata 20 unit per tahun.

Di wilayah terutama di daerah komersial, pasar, pertokoan dan perumahan sudah dikelola oleh Dinas Pasar dengan sistem terpusat dengan tempat pembuangan akhir (TPA). Realisasi penerimaan retribusi sampai bulan September tahun 2002 berjumlah Rp. 20.375.500,-

Berdasarkan data dan asumsi diatas maka potensi teoritis penerimaan ketiga komponen retribusi dikelola Dinas Pasar naik dua kali lipat atau berjumlah Rp. 40.751.000,-

❖ Kendala Operasional dan Potensi Realistis Penerimaan

- Sebagian besar pasar masih merupakan pasar yang dikelola oleh LKMD
- Adanya keengganan pedagang untuk membayar ketiga jenis retribusi tersebut
- Masih minimnya petugas yang akan melakukan pemungutan
- Masih minimnya fasilitas pasar sehingga sebagian pedagang enggan atau cenderung menolak membayar retribusi.

Dengan berbagai persoalan yang ada diperkirakan faktor kendala sekitar 0,20. Jadi faktor koreksi sebesar 0,80, artinya nilai potensi realistis penerimaan adalah sebesar $0,80 \times \text{Rp. } 40.751.000 = \text{Rp. } 32.600.80,-$.

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

- Sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan retribusi pasar supaya terdapat pemahaman dan kesadaran pedagang tentang arti dan manfaat retribusi itu sendiri.
- Menegakkan segala peraturan yang terkait dengan retribusi pasar termasuk sanksi terhadap pedagang yang mengabaikannya.
- Meningkatkan kesejahteraan pemungut retribusi
- Menerapkan sistem pengawasan terhadap jumlah subjek retribusi maupun terhadap realisasi penerimaan retribusi.

6. *Potensi Teoritis Penerimaan Penggantian Bea Cetak dan Akte Catatan Sipil*

Untuk menentukan potensi teoritis penerimaan digunakan dasar data tersebut di atas dan ditambah dengan beberapa asumsi berikut:

- Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk Rp.3.000,-
- Biaya akta perkawinan sebesar Rp.10.000,-
- Biaya akta kelahiran Rp.10.000,-

Dengan menjumlahkan semua potensi penerimaan dari penggantian KTP, akte perkawinan dan akte kelahiran di atas, maka jumlah penerimaan teoritis dari retribusi bea cetak akte dan catatan sipil Rokan Hilir adalah sebesar: Rp. 30.612.750 + Rp. 30.000.000 + Rp.70.000.000 = Rp.130.612.750,-

❖ Kendala Operasional dan Penerimaan Realistis

Baru dibentuknya beberapa kecamatan baru yang membuat aspek pelayanan masih sangat terbatas dan masih dalam tahap penataan administrasi internal.

Masih sangat rendahnya kesadaran penduduk untuk segera memiliki KTP dan akte kelahiran.

Masih banyak desa yang relatif belum begitu terjangkau dalam operasional aparat kantor Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut maka faktor kendala operasional diperkirakan sebesar 0.60. Dengan demikian faktor koreksi sebesar 0.40 atau potensi realistik penerimaan menjadi $0,40 \times (30.612.750 + 30.000.000 + 70.000.000) : 3 = \text{Rp } 17.415.033,-$

7. Potensi Teoritis Penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Potensi teoritis penerimaan retribusi izin peruntukan tanah di Kabupaten Rokan Hilir mempunyai peluang besar untuk ditingkatkan, antara lain melalui:

- Pendataan ulang bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan dalam jumlah besar terutama hasil perkebunan, pertanian dan minyak bumi, baik yang telah terdata maupun bagi perusahaan yang belum terdata.
- Merubah ketentuan nilai retribusi yang ada saat ini, karena dinilai sudah tidak realistis lagi. Tarif saat ini adalah: Rp. 100/m² untuk 50 m² pertama; Rp. 50/m² untuk 50 m² berikutnya; dan Rp. 25/m² untuk m² selanjutnya.

❖ Kendala Operasional dan Potensi Realistis Penerimaan

- Ada keengganan perusahaan untuk tidak mau membayar retribusi berdasarkan tarif baru.
- Keterlambatan dalam penyusunan perubahan tarif
- Kecepatan dan kemampuan petugas untuk mendata jumlah perusahaan dan luas lahan sesungguhnya yang digunakan (dikoordinasikan dengan BPPN)
- Berdasarkan hal tersebut maka faktor kendala operasional diperkirakan sebesar 0,30.
- Dengan demikian faktor koreksi sebesar 0,70 atau potensi realitis penerimaan $0,70 \times (20.000.000+30.000.000+50.000.000):3 = \text{Rp } 23.333.333,-$

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

- Meningkatkan kemampuan petugas terutama dalam memberikan pemahaman tentang perubahan tarif retribusi pada perusahaan yang menggunakan lahan dalam jumlah besar.
- Meningkatkan prasana dan sarana operasional pada petugas

8. Potensi Teoritis Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO)

- Menggunakan indeks dari skala tinggi sampai dengan skala rendah berdasarkan tingkat intensitas gangguan.
- Penggunaan angka indeks lokasi perusahaan berdasarkan kedekatan ke jalan negara, jalan propinsi, jalan Kabupaten atau jauh dekatnya perusahaan ke pelabuhan sungai.

- Menentukan skala tarif yang realistis berdasarkan luas ruang yang digunakan

Dengan menggunakan variabel tersebut maka rumusan tarif retribusi menjadi misalnya: $100 \text{ m}^2 \times \text{indek lokasi} \times \text{indek gangguan} \times \text{Rp. } 1.000/\text{m}^2$. Selibuhnya $\times \text{indek lokasi} \times \text{indek gangguan} \times \text{Rp. } 750 \text{ m}$. Dengan menggunakan formulasi tersebut maka diperkirakan penerimaan retribusi izin gangguan meningkat mencapai angka diatas yakni sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- per tahun.

❖ **Kendala Operasional Potensi Realistis Penerimaan**

- Waktu yang diperlukan untuk menyusun ketentuan baru yang realitis dan dapat diterima oleh pengusaha.
- Minimnya jumlah dan kemampuan petugas dalam melaksanakannya.
- Perlunya waktu untuk sosialisasi dikalangan pengusaha/pemegang HPH dan IPK pengguna jasa retribusi.
- Dengan memperhatikan faktor masalah tersebut maka faktor kendala diperkirakan mencapai 0,40, artinya faktor koreksi menjadi 0,60. Bila faktor koreksi menjadi acuan maka akan diperoleh potensi realisasi penerimaan pertahun sebesar: $0.60 \times 350.000.000 : 2 = \text{Rp } 105.000.000,-$

❖ **Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan**

- Percepatan waktu dalam menyusun ketentuan tarif baru
- Meningkatkan jumlah dan kemampuan petugas
- Mempercepat sosialisasi kepada pengusaha
- Mendata secara lebih lengkap dan komprehensif para pengguna jasa

9. Potensi Teoritis Penerimaan Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan perkembangan aktivitas ekonomi yang ada pada kedua Kecamatan (Kec. Bagan Sinembah dan Bangko) penerimaan izin mendirikan bangunan bisa mencapai kenaikan $\pm 50\%$ dari target yang lalu atau senilai Rp. 135.000.000,-

❖ **Kendala Operasional dan Potensi Realistis Penerimaan**

- Sangat luasnya wilayah dan tersebarnya daerah-daerah pertumbuhan ekonomi hingga tidak terpantau dan sulit dijangkau.
- Jumlah dan kemampuan petugas sangat terbatas.

- Belum tersosialisasi sepenuhnya tentang perlunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pendirian bangunan (masih dibantu data dari dinas Kimpraswil).

❖ Strategi Peningkatan Realistis Penerimaan

- Data secara lengkap dan kompherensif masyarakat yang memilik bangunan, terutama bangunan baru.
- Menambah dan meningkatkan kemampuan petugas untuk menjangkau wilayah yang luas.
- Terus menerus melakukan sosialisasi tentang perlunya mengurus IMB.

10. *Potensi Teoritis Penerimaan Retribusi Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pendaratan Kapal*

Untuk menilai besarnya potensi teoritis penerimaan ketiga retribusi tersebut, digunakan pendekatan yakni:

- Pembangunan Terminal. Penerimaan dari retribusi terminal ini diperkirakan mampu mencapai Rp. 20.000.000,- per tahun.
- Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bila diasumsikan jumlah kendaraan di Kabupaten Rokan Hilir 5 % maka jumlah yang ada mencapai 260 unit, maka potensi penerimaan teoritis adalah: 5 % mobil penumpang/truk (13 unit) x 250.000 = Rp. 3.250.000/6 bulan x 2/th = Rp. 6.500.000,-

- Pendaratan kapal.

Berdasarkan kenaikan volume keluar masuk kapal dan alat transportasi sungai lainnya diperkirakan penerimaan mencapai Rp.5.000.000,- per tahun.

❖ Kendala Operasional dan Target Realisasi Penerimaan

- Belum adanya terminal resmi di Kabupaten Rokan Hilir serta tempat pemungutan retribusi (TPR)
- Belum adanya data konkrit/jumlah kendaraan bermotor
- Belum jelasnya kedudukan pengelolaan dermaga umum
- Belum adanya data kapal kecil dibawah GT.7
- Jumlah dan kemampuan petugas yang masih terbatas

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperkirakan kendala operasional cukup tinggi yakni 0,40. Dengan demikian diperoleh faktor koreksi sebesar 0,6, artinya jumlah penerimaan realistik masing-masing retribusi tersebut adalah : $0,60 \times (20.000.000 + 6.500.000 + 5.000.000) = 18.900.000,-$

❖ Strategi Peningkatan penerimaan Realistik

Untuk mencapai peningkatan penerimaan realistik yang lebih tinggi dari ketiga jenis retribusi di atas perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Mempercepat melakukan kompilasi data jumlah kendaraan bermotor wajib uji.
- Meningkatkan jumlah dan kemampuan petugas.
- Mendata lebih lengkap dan komprehensif jumlah kapal kecil dibawah GT7.
- Percepatan penetapan terminal resmi dan TPR.

11. Potensi Teoritis Penerimaan Retribusi Parkir

Dua alternatif pola pengelolaan adalah:

- Dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah
- Dikontrakkan kepada pihak swasta

Jika pengelolaan parkir dilaksanakan dengan baik diperkirakan dapat memberikan potensi teoritis minimal Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- per tahun.

❖ Kendala Operasional dan Potensi Realistik Penerimaan

Kendala utama operasional ialah belum adanya peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan parkir ditepi jalan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor kendala relatif besar yakni sebesar 0,70. Artinya faktor koreksi menjadi 0,30. Dengan demikian potensi realitis penerimaan adalah: $0,30 \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 4.500.000,-$

❖ Strategi Peningkatan Penerimaan Realistik

- Percepatan pembuatan peraturan dan perangkatnya
- Menetapkan pola pengelolaan parkir
- Menetapkan lokasi parkir
- Melakukan pengawasan rutin

12. *Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Hasil perikanan*

Berdasarkan kenaikan produksi penangkapan dan budidaya keramba diperkirakan potensi penerimaan realistis izin usaha perikanan mencapai Rp 100.000.000 per tahun.

❖ Kendala Operasional

- Minimnya armada perikanan dan alat tangkap serta masih sangat tradisional
- Belum adanya tempat pelelangan ikan (TPI)
- Jumlah dan kemampuan petugas yang masih terbatas
- Banyaknya pencurian penangkapan ikan oleh kapal asing atau dari daerah lain yang tidak terdeteksi dan tidak dapat dicegah, menggunakan teknologi antara lain bom yang mengakibatkan ikan-ikan mati.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperkirakan kendala operasional cukup tinggi yakni 0.60. Dengan demikian diperoleh faktor koreksi sebesar 0.40, artinya jumlah penerimaan realistis adalah: $0.40 \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 40.000.000,-$

❖ Strategi Peningkatan Penerimaan Realistis

- Peningkatan penguasaan teknologi penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil tangkapan.
- Penyempurnaan Manajemen.
- Melakukan pengawasan dan penertiban penangkapan ikan secara tidak sah (illegal) baik oleh nelayan asing maupun nelayan dari luar daerah agar tidak terjadi kelebihan tangkap secara tidak terkontrol.
- Melakukan pencegahan penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan seperti menggunakan bahan peledak.

13. *Potensi teoritis Penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan*

Dari perkembangan dan pertumbuhan tersebut, diperkirakan bahwa potensi teoritis penerimaan retribusi pemotongan hewan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bahkan mungkin lebih dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp 85.000.000,-.

❖ Kendala Operasional Potensi Realisasi Penerimaan

- Belum adanya rumah pemotongan hewan (RPH)
- Mahalnya biaya pendirian RPH

Berdasarkan kendala tersebut, maka diperkirakan kendala operasional cukup tinggi yakni 0.60. Dengan demikian diperoleh faktor koreksi sebesar 0,40, artinya jumlah penerimaan realistis adalah $0,40 \times \text{Rp } 85.000.000 = \text{Rp } 34.000.000,-$

❖ Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan

- Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
- Pengembangan usaha peternakan
- Pembangunan sarana dan prasarana peternakan

14. Lain-lain Pendapatan

Penerimaan PAD dari lain-lain pendapatan berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan bulan September 2002 berjumlah Rp. 9.634.546.891,-. Penerimaan terbesar dari jasa giro sebesar Rp.6.440.176.458,-. Penerimaan lain-lain sebesar Rp.3.194.370.433,- dan penerimaan dari Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp.58.220.000,-.

. Dimasa depan jika terdapat kemungkinan penerimaan lain-lain dapat diprediksikan maka sebaliknya dimasukkan dalam komponen retribusi daerah diperkirakan penerimaan lain-lain tahun 2003 bisa mencapai Rp. 2.500.000.000.

15. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah akan mengalami peningkatan terutama dari penyertaan modal daerah di BPD Riau dan BSP diperkirakan untuk tahun 2003 kontribusi bagian laba usaha didaerah bisa mencapai Rp. 1.500.000,-.

B. Potensi Dana Perimbangan

1. Potensi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Mengingat lajunya pertumbuhan ekonomi , termasuk pertumbuhan pembangunan perumahan di Rokan Hilir, maka target penerimaan bagi hasil pajak untuk tahun 2003 bisa ditingkatkan sekitar 20 hingga 50 Persen. Terutama PBB, BPHTB dan PPH pasal 21.

Potensi Penerimaan Bagi Hasil Sumber daya Alam hingga September 2002 realisasi penerimaan bagi hasil PBB non-pertambangan baru mencapai 24, 50 persen. Untuk PBB pertambangan 61,44 persen, untuk PPh Pasal 21 53,75 persen. Sedang perolehan bagi hasil BPHTB baru mencapai 1,56 persen. Secara keseluruhan realisasi penerimaan bagi hasil pajak tahun 2002 baru 33,01 persen.

2. Bagian Daerah dari Bagi Hasil Sumberdaya Alam

Potensi perolehan bagi hasil sumberdaya alam kabupaten Rokan Hilir tahun 2002 jauh turun dibanding tahun 2001. Hal ini terutama disebabkan turunnya perolehan bagi hasil minyak dari Rp 475.287 juta tahun 2001 menjadi Rp 346.920 juta tahun 2002. Konon hal ini disebabkan semakin berkurangnya produksi minyak dari Rokan Hilir sebagai akibat kasus pembakaran 4 buah sumur minyak di Kecamatan Tanah Putih tahun 2001. Karena ada sumur yang terbakar dan pipa meledak, wajar jika hasil produksi turun dan biaya produksi naik, sehingga perolehan bagi hasil minyak untuk Rokan Hilir berkurang.

3. Potensi DAU dan DAK

Pada tahun 2001 Kabupaten Rokan Hilir memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 91.850.000.000, dan DAK sebesar Rp 9.963.360.000. Pada tahun 2002 penerimaan DAU ditetapkan sama dengan tahun 2001, yaitu sebesar Rp 91.850.000.000.

Menurut informasi dari Panitia Anggaran DPR RI, untuk tahun 2003 diperkirakan total DAU secara nasional akan ditingkatkan sekitar Rp 7 triliun, lebih kurang 25 persen (Riau Pos, 9 Oktober 2002). Jika informasi ini benar, berarti penerimaan DAU tahun 2003 akan lebih besar dari penerimaan tahun 2001 dan 2002. Tetapi dalam suasana politik global dan nasional yang tak menentu pasca peledakan bom-Bali dan suasana mendekati pemilu 2004 ini jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa saja berubah.

C. Masalah Dan Kendala

Ada kejanggalan dalam pengalokasian dana ke daerah-daerah. Sebagai contoh, menurut aturannya PBB pertambangan dibagi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya ditemui kasus dimana ada daerah yang bukan penghasil migas tetapi menerima PBB pertambangan yang lebih besar dari kabupaten/kota penghasil migas.

Dari segi administrasi pencatatan penerimaan, kadang-kadang Daerah menerima setoran yang tidak jelas dari pusat. Misalnya untuk Rokan Hilir ada setoran dari Kasda sebanyak Rp 14.680.000 yang tidak tahu pos untuk apa. Oleh karena itu oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir terpaksa dimasukkan ke dalam kategori penerimaan lain-lain.

Untuk bagi hasil pajak, masalah-masalah dan kendala yang dihadapi tersebut ialah: Bagi hasil Pajak, terutama untuk PBB non-pertambangan, BPHTB dan Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor tahun 2001 jauh dari target. Hal ini diduga disebabkan data yang digunakan dalam perhitungan masih menggunakan data lama. Pencatatan masih belum konsisten. Dalam satu laporan Bagi pajak PPh Pasal 21 dicantumkan, sedang Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak bagi hasil PBB pertambangan tidak dicantumkan. Pada laporan lain pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil PBB pertambangan dicantumkan, sedang pajak PPh pasal 21 tidak dicantumkan.

IV.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- Realisasi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2001 dan 2002 sangat variatif dan dengan derajat perbedaan yang sangat mencolok. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh tahun-tahun pertama kegiatan operasionalnya kabupaten Rokan Hilir melakukan pemungutan dan belum tersedianya data dan akurasi data secara maksimal,
- Tahun 2003 di perkirakan potensi jumlah pembentukan PAD dan Dana Perimbangan akan mencapai peningkatan yang signifikan berkisar 20-30 persen dibandingkan penerimaan tahun 2002.

- Diperkirakan pos-pos pendapatan daerah tahun 2003 masih relatif sama dengan periode sebelumnya. Penyebabnya antara lain, belum optimalnya dukungan dari Sumber Daya Manusia (aparatur) maupun dari perangkat hukum (Perda) yang masih mengacu pada kabupaten induk (kabupaten Bengkalis).

B. Saran dan Rekomendasi

- Pemerintah kabupaten Rokan Hilir perlu memiliki sistem pengendalian yang terukur, agar dalam pengelolaan penerimaan daerah dapat dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati.
- Pemerintah kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dana perimbangan. Format pelaporan Dinas Pendapatan Rokan Hilir perlu diperbaiki, dan konsistensi pelaporan sedapat mungkin lebih diperhatikan, sebab sering tidak lengkap dan inkonsisten. Misalnya tidak ada perincian laporan dana bagi hasil sumber daya alam, tidak melaporkan perolehan dana bagi hasil gas alam tahun 2002; memasukan bagian pajak kendaraan bermotor (PBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ke dalam pos Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Syah. Yang benar adalah : Seharusnya masuk ke dalam pos Bagi Hasil Pajak.

REFERENSI

- Bintoro Tjoktoamidjojo, 1991. Pengantar Adminstrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.
- Faisal Basri, 1995, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Erlangga, Jakarta
- Harun, Hamrolie, 1990. Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota, Andi Offset, Yogyakarta
- Hendra Esmara. 1992. Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Hendra Esmara dkk, , 1992. Keuangan Daerah, Intermedia, Jakarta.
- Maskun Soemitro, 1995. Manajemen Pembangunan Daerah dalam Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi daerah yang Nyata dan bertanggung jawab. Makalah Seminar UNPAD Bandung.
- Nugroho. D.2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi, Elexmedia Komputindo), Jakarta
- Rustian kamaluddin, 1992. Bunga Rampai Pembangunan dan Pembiayaan Daerah. LPFE-UI, Jakarta.
- Undang otonomi daerah 1999. Departemen Dalam Negeri, Sinar Grafika, jakarta.
- Widjaja, H.A.W, 1998, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____,1992. Departemen Dalam Negeri, Himpunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, Jakarta,